

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI AJARAN AGAMA BUDDHA OLEH POLITISI BERAGAMA BUDDHA

Agus Wahyu Giri Putra

aguswgputra@gmail.com

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten

ABSTRAK

Agus Wahyu Giri Putra. 2020. Implementasi Nilai-Nilai Ajaran Agama Buddha Oleh Politisi Beragama Buddha. Skripsi. Program Studi Jurusan Dharmaduta. Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten. Pembimbing I Dr. Edi Ramawijaya Putra, M.Pd. dan pembimbing II Dr. I Ketut Damana, M.Si.

Kata Kunci: Implementasi Nilai-Nilai Buddhis, Politisi beragama Buddha

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi nilai-nilai ajaran agama Buddha bagi politisi beragama Buddha. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Implementasi nilai-nilai Buddhis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi. Informan dari penelitian ini diambil oleh peneliti dari anggota DPR RI berbagai komisi yaitu: wakil ketua komisi IV (empat), anggota komisi II (dua), dan anggota komisi X (sepuluh). Hasil dari penelitian ini (1) bentuk-bentuk implementasi nilai-nilai ajaran agama Buddha oleh politisi beragama Buddha yaitu selalu mengembangkan cinta kasih (metta) yang universal selalu mengedepankan sesama, siap mengorbankan kesenangan pribadi untuk kesejahteraan masyarakat atau umat buddha, menjaga keselamatan orang lain, berusaha jujur dalam bertindak, semangat dan memiliki tekad yang kuat untuk selalu dapat berkontribusi dengan masyarakat dalam hal-hal positif. (2) Pelaksanaan implementasi nilai-nilai ajaran agama Buddha oleh politisi beragama Buddha adalah dengan melakukan berbagai program yang dapat menguntungkan bagi masyarakat berupa memberikan bantuan beasiswa atau tunai bagi anak-anak yang kurang mampu, merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, menjadi sebuah tanggung jawab, dan moral karena menjadi perwakilan rakyat didalam lingkup pemerintahan.

PENDAHULUAN

Kepemimpinan dalam pemerintahan adalah cara bagaimana seseorang pemimpin menggerakkan atau menjalankan sesuatu pekerjaan untuk mencapai sebuah tujuan atau kegiatan yang akan dicapai. Seorang pemimpin sangat

diperlukan dalam suatu sistem pemerintahan karena harus menjalankan kewajiban dan perannya sebagai pemimpin yang telah dipilih oleh masyarakat. Dalam agama Buddha terdapat konsep standar sebagai seorang pemimpin yang baik. Seorang penguasa dunia adalah raja yang adil dan luhur yang tergantung pada kebenaran (Dhamma/Dharma), yang menghargai, menjunjung tinggi dan menghormati dengan hukum kebenaran.

Keadaan atau kondisi yang terjadi di Indonesia saat ini yaitu sangat memprihatinkan, para pemimpin saling memperebutkan kekuasaan dengan cara berpolitik. Politik sering kali disebut sebagai kekuasaan, karena seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk dapat mengendalikan masyarakat dan mampu membuat mereka percaya, terkadang manusia tidak mengerti akan batasan kepentingan pribadi dan kepentingan umum yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, tindakan seorang pemimpin seringkali melebihi batas dan bahkan menyimpang dari garis kebenaran, ini dikarenakan pemahaman tentang nilai-nilai agama dalam keterlibatan seseorang di dunia politik masih rendah, karena pengetahuan politik tidak didasari dengan nilai-nilai agama berakibat pada turunnya kualitas pemimpin tersebut.

Rendahnya moral dari para kaum elite politik yang akan menimbulkan dekadensi moral dari seorang pemimpin tersebut dan juga berdampak pada ketidakseimbangan yang merata antara seorang pemimpin dan rakyat, karena dari adanya pemimpin yang rendah moral tersebut, kepentingan rakyat menjadi disepelekan dan pemerintahan lebih cenderung memikirkan kepentingan yang memegang.

Menyikapi potensi negatif yang mungkin muncul dari kekuasaan politik maka dalam kondisi ini, harus dapat mengimbangnya dengan roda kebenaran. Dalam pandangan agama Buddha berpolitik haruslah dilandasi dengan cinta kasih. Cinta kasih ini harus dikembangkan oleh masing-masing individu dalam sebuah kelompok masyarakat. Hal ini penting karena sebaik apapun suatu sistem politik, semua bergantung pada moralitas individu yang membentuk komunitas.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka (Moleong, 2012: 11). Metode penelitian ini digunakan untuk menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan fenomena yang terjadi dalam objek penelitian. Penulis menggunakan metode ini untuk mengungkapkan tentang implementasi nilai-nilai ajaran agama Buddha oleh politisi beragama Buddha.

Subjek penelitian ini adalah politisi beragama Buddha. Objek penelitian ini adalah implementasi nilai-nilai ajaran agama Buddha oleh politisi beragama Buddha. Implementasi nilai-nilai ajaran agama Buddha yang dimaksud adalah

politisi beragama Buddha yang mengimplementasikan nilai-nilai ajaran agama Buddha` Teknik pengumpulan data menggunakan teknik nontes. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi memerlukan alat bantu yang akan di gunakan dalam mengamati, mendengar, berbicara, bertanya, dan meminta penjelasan secara detail dari informan penelitian.

Pada dasarnya keabsahan data dilakukan seiring dengan pelaksanaan analisis data. Keabsahan dilakukan untuk menjamin validitas dan kredibilitas data, meliputi kepercayaan, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian. Teknik analisis data dilakukan untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang benar tentang implementasi nilai-nilai ajaran agama Buddha. Data yang diperoleh dari hasil pengamatan observasi, wawancara, dan dokumentasi, dicatat secara lengkap untuk dapat dianalisis. Sugiyono (2012: 334) menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami oleh panitia dan dapat diinformasikan kepada orang lain.

Analisis data merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pengumpulan data. Data dan informasi tentang implementasi nilai-nilai ajaran agama Buddha yang sudah dikumpulkan secara berkelanjutan dapat ditafsirkan maksudnya. Data analisis dengan teknik deskriptif, yaitu memaparkan atau mendeskripsikan data kualitatif. Dalam menganalisis data penelitian menggunakan langkah-langkah atau penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini diperoleh peneliti dengan teknik observasi, teknik wawancara secara mendalam kepada informan, dan dokumentasi. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berhubungan dengan implementasi nilai-nilai ajaran agama Buddha oleh politisi beragama Buddha. Hasil penelitian ini membahas mengenai: (1) bentuk-bentuk implementasi nilai-nilai ajaran agama Buddha oleh politisi beragama Buddha; (2) pelaksanaan implementasi nilai-nilai ajaran agama Buddha oleh politisi beragama Buddha.

1. Bentuk-bentuk implementasi nilai-nilai ajaran agama Buddha

Memahami dalam konteks agama, sejatinya membuat diri sendiri bahagia dan orang lain bahagia adalah perbuatan kebajikan, setiap tindakan, pikiran, ucapan yang diperoleh dari agama bersifat baik dan membuat orang lain bahagia. politisi beragama Buddha, berpolitik praktis dengan bertujuan memperjuangkan hak-hak masyarakat, dengan menjadi anggota dewan perwakilan rakyat republik Indonesia (DPR RI), dengan

begitu dapat memberikan kebijakan yang dapat menguntungkan dan mensejahterakan masyarakat.

Karena dengan tindakan politik akan membawa dampak yang begitu positif bagi keseluruhan masyarakat, dan cita-cita kehidupan umat Buddha khususnya. Sebagai umat Buddha sudah sepatutnya memiliki peran di pemerintahan atau pemangku kebijakan, dengan tetap menjalankan nilai-nilai ajaran agama Buddha yang diterapkan dalam politik praktis. Politisi beragama Buddha memiliki peran dalam menentukan keputusan kebijakan yang bersifat politik. Pengambilan keputusan dalam kebijakan juga berlandaskan permusyawaratan, dengan menjaga kerukunan dan menghargai pendapat lain, demi terwujudnya mufakat. Tindakan politisi beragama Buddha sejalan dengan nilai-nilai ajaran agama Buddha, hal ini seperti yang sudah diterapkan oleh beberapa politisi dengan pemberian bantuan beasiswa bagi umat Buddha dan masyarakat Umum dari ekonomi yang tidak mampu, tujuannya adalah mencerdaskan generasi bangsa agar menjadi manusia yang cerdas dalam kategori berpendidikan dan bermoral.

Menjaga toleransi dan kerukunan, sebagai politisi yang beragama Buddha dan sudah menjadi tokoh politik, tindakan mencerminkan sikap yang dilandasi cinta kasih (metta) sangat penting untuk diterapkan. Seperti yang dilakukan oleh politisi agama Buddha, yang saat ini menjadi anggota dewan perwakilan rakyat republik Indonesia (DPR RI). Menghimbau dan menerapkan kehidupan rukun dan toleransi dilingkungan masyarakat, himbauan dan saat kunjungan kerja juga menyampaikan hal demikian.

2. Pelaksanaan implementasi nilai-nilai ajaran agama Buddha oleh politisi beragama Buddha

Politisi beragama Buddha sudah melaksanakan kegiatan politik dengan berlandaskan nilai-nilai ajaran agama Buddha. Mengimplementasikan dengan program-program, kebijakan, sosialisasi hingga bantuan tunai ataupun beasiswa. Hal ini merupakan penerapan nilai-nilai ajaran agama Buddha secara kontekstual.

Membuktikan bahwa berpolitik masih bisa mempraktikkan ajaran agama Buddha. Bukankah sungguh terpuji politisi beragama buddha yang memikirkan dan memperjuangkan kebahagiaan orang lain, ketimbang kepentingannya sendiri. Pelaksanaan nilai-nilai ajaran agama Buddha sudah dipraktikkan dan dilaksanakan di masyarakat. Hal tersebut dibuktikan saat merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, menjadi sebuah tanggung jawab, dan moral karena menjadi perwakilan rakyat didalam lingkup pemerintahan.

Tanggung jawab kemanusiaan dalam masyarakat secara menyeluruh melibatkan tindakan politisi itu adalah mewujudkan agar kehidupan masyarakat itu sungguh-sungguh baik dan bernilai, dimana

nilai-nilai moral spiritual menjadi nyata dan hal ini dapat didasarkan pada nilai-nilai ajaran Sang Buddha. Namun, hendaknya dipahami bahwa keterlibatan politis yang berdasarkan pada prinsip ajaran agama yang tidak bertentangan dengan negara ini bukanlah dalam arti untuk mendirikan negara agama, dimana prinsip-prinsip agama itu dijalankan oleh negara, melainkan dalam arti sejauh yang berkenaan dengan prinsip moral umum yang sejalan dengan agama.

Menghadapi hambatan-hambatan yang dialami menjadi politisi pastinya sangat penting, menghadapi hal tersebut tentunya dibutuhkan upaya yang baik, tetap tenang, bertanggung jawab serta sabar. politisi yang beragama Buddha memiliki upaya tersendiri dalam mengatasi hambatan yang dapat menyebabkan gangguan, upaya ini datang dari diri sendiri, dukungan keluarga dan bahkan dukungan teman. mulai dari diri sendiri, tentunya keyakinan, kesabaran dan meditasi agar tetap tenang, hal tersebut saat menghadapi permasalahan tidak semakin kacau atau memperburuk keadaan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik sebagai berikut:

1. Politisi beragama Buddha membuat kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat, selain itu sebagai politikus menjadi contoh dengan tetap menyampaikan pentingnya hidup santun. Melalui pemahaman Dharma yang baik, politikus beragama Buddha mampu menyampaikan Dharma agar senantiasa dipraktikan dalam bernegara. Tetap menjaga toleransi, mengasihi semua makhluk secara universal dan menjaga kerukunan disetiap segi kehidupan masyarakat dapat menciptakan kedamaian.
2. Politisi beragama Buddha banyak melakukan kegiatan, program, dan kebijakan yang membantu masyarakat, dengan tetap berlandaskan nilai-nilai Dharma. Seperti, membantu menyekolahkan anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Kebijakan melalui program untuk membantu para petani, nelayan dan masyarakat lainnya. Penerapan tentang nilai-nilai Buddhis dilakukan dalam berkehidupan sebagai seorang politikus beragama Buddha, kesabaram (khanti), semangat (viriya), hati seimbang (upekkha) dan tanggung jawab telah dilakukan.

Saran-saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan kesimpulan di atas yaitu:

1. Bagi politisi beragama Buddha sebaiknya mempraktikkan nilai-nilai ajaran agama Buddha dan Dasa Raja Dharma di masyarakat umum maupun bagi umat Buddha sehingga mampu berkontribusi dan bertanggung jawab.

2. Bagi pembaca hendaknya mengetahui implementasi nilai-nilai ajaran agama Buddha yang telah dilakukan oleh politisi beragama Buddha dalam kehidupan sehari-hari maupun aktivitas kegiatan berpolitik.
3. Bagi peneliti selanjutnya, agar menggali lebih dalam lagi data terkait dengan implementasi nilai-nilai ajaran agama Buddha oleh politisi beragama Buddha agar menemukan informan baru yang belum diketahui.

DAFTAR ACUAN

- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Burmansah. 2020. *Mindful Leadership Model & practice*. Jakarta Barat: Yayasan Karaniya.
- Djawamaku, H, Anton. *Dialektika Struktur dan Kultur dalam Proses Pembaharuan Politik Order baru*. Analisa. 1984-1988.
- Fitriani, Ardila. 2013. *Fungsi ideologi dalam Partai Politik: Studi Kasus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Perumusan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tahun 2010-2011*. Depok: Universitas Indonesia.
- Ishomuddin. 2013. *Pemahaman Politik Islam Studi Tentang Wawasan Pengurus dan Simpatisan Partai Politik Berasas Islam Di Malang Raya*. Malang: Jurnal Hurmanity. Vol 8. ISSN 0216-8995.
- Nambo, Abdulkadir B. 2005. *Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik. Sistem Politik*. 21(2): 262-285.
- Subowo, Ajib. 2017. *Kepemimpinan Politik Nurdin Abdullah di Kabupaten Banteng*. Makassar: Universitas Hasanuddin.